

Sebagaimana data yang telah dipaparkan dalam bab III bahwa Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya dalam menentukan besaran *ujrah* pada pembiayaan *rahn* didasarkan pada harga barang/nilai taksiran *marhūn* ($ujrah = \text{nilai taksiran} * \text{tarif } ujarah$) dan lamanya penitipan/pinjaman. Pengenaan *ujrah* melalui taksiran memenuhi unsur keadilan, yaitu barang (*marhūn*) yang memiliki nilai tinggi, memiliki resiko biaya lebih tinggi sehingga dikenakan *ujrah* lebih tinggi.

Dalam sistem *rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya, terjadi perbedaan pengenaan biaya *ujrah* antara satu nasabah dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan *marhūn* (barang) dengan jenis barang yang sama, harga yang sama, taksiran yang sama, dan kondisi barang yang sama. Hal itu, disebabkan karena adanya diskon *ujrah*. Diskon *ujrah* adalah potongan biaya sewa (*ujrah*) yang diberikan kepada nasabah karena melakukan pinjaman lebih kecil/di bawah nilai pinjaman maksimal, sehingga resiko yang dihadapi perusahaan, yaitu resiko *marhūn bih* tidak dikembalikan oleh nasabah menjadi berkurang.

Namun dalam praktek yang terjadi, penentuan prosentase tarif diskon *ujrah* di Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya, perhitungannya masih dikaitkan dengan besarnya jumlah pinjaman nasabah. Untuk penjelasannya, sebagai berikut:

Bu Rani dan Bu Ina merupakan dua nasabah yang berbeda. Mereka sama-sama menggadaikan satu keping logam mulia berat 5 gram dengan karatase emas 24 karat di Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya.

Maka besaran *ujrah* yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya kepada Bu Ina dengan pinjaman Rp.500.000,- adalah sebesar Rp.2.400,- tiap 10 hari.

Berdasarkan pemaparan kasus di atas, bahwa besaran *ujrah* di Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya ditentukan berdasarkan nilai taksiran \bar{marhun} , sedangkan yang membedakan besaran *ujrah* adalah adanya diskon *ujrah*. Dalam perhitungan pemberian diskon *ujrah*, penentuan tarif diskon *ujrah* di Pegadaian Syariah didasarkan pada prosentase pinjaman dari nilai taksiran \bar{marhun} (**Prosentase pinjaman=Pinjaman/Taksiran*100%**) dan perhitungan tarif pada *ujrah* awal (sebelum diskon), juga dihitung berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Ketika Bu Rani melakukan pinjaman sebesar Rp.1.000.000; (golongan B₁), prosentase tarif *ujrah* awal (sebelum diskon) yang dikenakan sebesar 0,71% dari nilai taksiran (Rp.16.100;), sedangkan ketika Bu Ina melakukan pinjaman Rp.500.000; (golongan A), prosentase tarif *ujrah* awal (sebelum diskon) dikenakan sebesar 0,45% dari nilai taksiran (Rp.10.200;). Dalam hal ini, sebaiknya Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya dalam menentukan prosentase tarif pada *ujrah* awal (sebelum diskon) kedua nasabah tersebut disamakan, yaitu 0,71% dari nilai taksiran, karena nilai taksiran \bar{marhun} sebesar Rp.2.257.910; (merupakan golongan taksiran B₂, dan prosentase tarif *ujrah*nya 0,71%).

B. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 terhadap Besaran *Ujrah* pada Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.

Gadai secara syariah, tidak ada pembunga-an uang pinjaman, yang ada hanya biaya penitipan barang (*ujrah*). *Ujrah* adalah biaya yang harus dibayar oleh *rahin* (nasabah) kepada pihak pegadaian syariah atas jasa pengolahan *marhūn*. Jasa pengolahan *marhūn* ini dipungut untuk sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhūn* milik *rahin* selama digadaikan.

Besaran *ujrah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn*) pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya ditentukan berdasarkan harga barang yang digadaikan/nilai taksiran *marhūn* ($ujrah = \text{nilai taksiran} * \text{tarif } ujrah$). Sedangkan yang membedakan biaya *ujrah* yang dikenakan antara satu nasabah dengan nasabah lain, yang menggadaikan *marhūn* (barang) dengan nilai taksiran *marhūn* yang sama tetapi jumlah pinjaman yang dilakukan nasabah tersebut berbeda adalah adanya pemberian diskon *ujrah*.

Diskon *ujrah* diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah karena melakukan pinjaman lebih kecil/di bawah nilai pinjaman maksimal. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI no. 25 tahun 2002

tidak dijelaskan mengenai pemberian bonus/diskon *ujrah* dalam pembiayaan *rahn*. Tetapi pihak Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya memberikan bonus/diskon *ujrah* kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi karena nasabah telah melakukan pinjaman lebih kecil/di bawah nilai pinjaman maksimal, sehingga resiko perusahaan terhadap *marhūn bih* tidak dikembalikan oleh nasabah menjadi berkurang. Selain itu, untuk meringankan biaya yang harus ditanggung oleh nasabah.

Di Pegadaian Syariah dalam hal pemberian bonus menggunakan dasar fatwa DSN no. 23/2002 dan fatwa DSN no. 46/2005 tentang bonus dalam akad *murābahah*, yang sebenarnya tidak pas. Karena dalam prakteknya, pemberian bonus (diskon *ujrah*) di Pegadaian Syariah lebih pas menggunakan prinsip *wadi'ah*, yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Pemberian bonus tidak dilarang, dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan hal ini merupakan kebijakan dari bank/lembaga keuangan bersangkutan yang bersifat sukarela.

Namun dalam praktek yang terjadi, penentuan prosentase tarif diskon *ujrah* di Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya, perhitungannya masih dikaitkan dengan besarnya jumlah pinjaman nasabah (sebagaimana dalam contoh kasus di atas). Dalam perhitungan pemberian diskon *ujrah*, penentuan tarif diskon *ujrah* di Pegadaian Syariah didasarkan pada prosentase pinjaman dari nilai taksiran *marhūn*

($\text{Prosentase pinjaman} = \frac{\text{Pinjaman}}{\text{Taksiran}} * 100\%$) dan perhitungan tarif pada *ujrah* awal (sebelum diskon), juga dihitung berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Ketika Bu Rani melakukan pinjaman sebesar Rp.1.000.000; (golongan B₁), prosentase tarif pada *ujrah* awal (sebelum diskon) dikenakan sebesar 0,71% dari nilai taksiran (Rp.16.100;). Sedangkan ketika Bu Ina melakukan pinjaman Rp.500.000; (golongan A), prosentase tarif pada *ujrah* awal (sebelum diskon), dikenakan sebesar 0,45% dari nilai taksiran (Rp.10.200;).

Karena pemberian diskon *ujrah* terkait dengan penentuan besaran *ujrah*, yang mana perhitungannya disyaratkan dimuka yang didasarkan pada jumlah pinjaman nasabah, maka hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN nomor 25 tahun 2002, bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jadi, dapat diartikan bahwa berapapun pinjaman yang dilakukan oleh nasabah, baik ketika ada dua nasabah yang menggadaikan barang dengan jenis barang yang sama, nilai taksiran yang sama, dan berbeda dalam jumlah pinjaman, maka besaran *ujrah*nya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman nasabah tersebut.

C. Analisis Diskon *Ujrah* Pegadaian Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002

Setelah memahami operasional tentang *ujrah* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya, maka peneliti membuat redaksi perhitungan

- a) Kebutuhan mendesak yang terdiri dari kebutuhan yang timbul karena adanya musibah, sakit, pembayaran angsuran kredit/pembiayaan dan lain-lain. Sehingga Pegadaian Syariah dapat memberikan diskon *ujrah* sebesar 9%, karena tingkat urgensi kebutuhan yang sangat tinggi maka diberikan diskon *ujrah* yang tinggi.
- b) Pendidikan, karena Pegadaian Syariah peduli terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Diantaranya untuk pembayaran SPP, pembelian alat tulis, dan lain-lain. Oleh karena itu Pegadaian Syariah dapat memberikan diskon *ujrah* sebesar 7%, karena aspek pendidikan sangat penting dalam peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.
- c) Hajatan, yang terdiri dari tasyakuran, pernikahan, hari raya dan lain-lain. Pegadaian Syariah dapat memberikan diskon *ujrah* sebesar 5%, karena tingkat urgensi tidak terlalu tinggi, tingkat kebutuhan seperti ini memang sebelumnya sudah dipersiapkan hanya saja masih ada kekurangan. Berbeda dengan kebutuhan mendesak dan pendidikan.
- d) Modal usaha, Pegadaian Syariah dapat memberikan diskon *ujrah* sebesar 3% untuk kebutuhan modal usaha. Karena tingkat urgensi tidak terlalu tinggi dan sudah pasti nasabah memiliki usaha, hanya saja masih kurang dalam permodalan sehingga Pegadaian Syariah memberikan diskon *ujrah* sebesar 3% untuk kebutuhan tersebut.

